



Kontruksi Wacana Bhinneka Tunggal Ika dalam Dokumen Revisi Kurikulum 2013

Hermanu Joebagio, Djono, Nur Fatah Abidin

hermanu.joebagio@staff.uns.ac.id; djono@staff.uns.ac.id;

ikbenfatah@gmail.com

Universitas Sebelas Maret

Abstract

This study analyzes the construction of the discourse of Bhinneka Tunggal Ika in the 2013 Curriculum Revision document. The 2013 Curriculum Revision Document, specifically the High School Subject Syllabus Document for Indonesian History Subjects (2016) becomes the research body. Critical Discourse Analysis using the socio-cognitive approach is used as an analytical tool which consists of three intersecting layers of analysis, namely text, context, and intertextuality analysis of 2013 curriculum documents. negotiation space between local interests and national interests and strengthening diversity in unity. These two dimensions are the empirical basis of the foundation of curriculum development. The text of Unity in Diversity contextually reflects the hope of creating equality between diversity and unity.

Keywords : *Curriculum, Bhinneka Tunggal Ika, analyzes*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konstruksi wacana Bhinneka Tunggal Ika dalam dokumen Revisi Kurikulum 2013. Dokumen Revisi Kurikulum 2013, khususnya dokumen Silabus Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas untuk Mata Pelajaran Sejarah Indonesia (2016) menjadi korpus yang diteliti. Analisis Wacana Kritis dengan pendekatan socio-cognitive digunakan sebagai alat analisis yang terdiri dari tiga lapisan analisis yang saling bersinggungan yaitu analisis teks, konteks, dan intertekstualitas terhadap dokumen kurikulum 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara diskursif, revisi Kurikulum 2013 telah mengkonstruksi wacana Bhinneka Tunggal Ika dalam ruang negosiasi antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional dan penguatan keberagaman dalam persatuan. Dua dimensi ini menjadi basis empiris dari landasan pengembangan kurikulum. Teks Bhinneka Tunggal Ika secara kontekstual merefleksikan pengharapan terciptanya kesetaraan antara keberagaman dan persatuan.

Kata kunci: *Kurikulum, Bhinneka Tunggal Ika, Analisis Wacana*



Pendahuluan

Kurikulum pendidikan sejarah berkaitan dengan kepentingan politis sebagai akibat dari peran ganda yang diemban pembelajaran sejarah. Peranan utama pembelajaran sejarah adalah mengajarkan pengetahuan, nilai, dan kebajikan dari suatu peristiwa di masa lalu. Pada sisi lain pembelajaran sejarah juga bertujuan membentuk pengetahuan kewarganegaraan. Konsekuensi logis dari peran ganda ini adalah keberadaan wacana politik, ekonomi, sosial, dan kultural dalam kurikulum pendidikan sejarah baik secara implisit ataupun eksplisit.

Secara historis, dalam seminar sejarah 1957, permasalahan dualisme peran pembelajaran sejarah dibicarakan dalam ruangdiskusi filosofi sejarah nasional dengan pemrasaran Mohammad Yamin dan Soedjatmoko yang menjadi salah satu topik yang diperdebatkan selama seminar. Yamin mengedepankan tujuan normatif dari pembelajaran sejarah yaitu aspek nation-building. Sementara itu, Soedjatmoko lebih menekankan dimensi pengembangan pengetahuan dalam kebermanfaatn sejarah. Di samping itu juga dibicarakan mengenai bagaimana arah dan tujuan dari pembelajaran sejarah yang menyangkut permasalahan nasionalisme dan eksistensi lokal di dalamnya yang bertahan hingga era saat ini (Ali, 1995).

Seminar sejarah 1957 tidak menghasilkan kebulatan pendapat terkait peranan filosofis sejarah dan pembelajaran sejarah, tetapi dengan melihat perkembangan pada berikutnya, khususnya dengan melihat hasil dalam Seminar Sejarah II, tampak bahwa peranan sejarah dan pembelajaran cenderung menekankan dimensi pembangunan nasionalisme. Sebenarnya, Sartono Kartodirjo telah menyediakan landasan bagi perdebatan tersebut dengan menyediakan konsep multidimensional dan penulisan sejarah yang integratif. Sayangnya, upaya Sartono ini tidak mendapatkan perhatian untuk dipertimbangkan sebagai landasan pembelajaran sejarah. Akibatnya, permasalahan ini terus menerus membayangi dimensi filosofis pembelajaran sejarah hingga saat ini dan pada tingkatan tertentu memengaruhi wacana politik dan sosial dalam materi sejarah.

Permasalahan persatuan dan keberagaman atau *Kebhinnekaan* menjadi salah satu topik yang secara berkesinambungan diwacanakan dalam kurikulum pendidikan Sejarah di Indonesia. *Bhinneka Tunggal Ika* memiliki dua eksponen yang paradoksal: persatuan dan keberagaman. Pertanyaannya adalah sejauh mana kurikulum mengkonstruksi dua eksponen paradoksal tersebut. Beberapa peneliti telah mengindikasikan adanya kelemahan dan ketidakefektifan Kurikulum 2013 dalam mengakomodasi kepentingan persatuan dan permasalahan keberagaman. Penelitian Djalong (2017) mengindikasikan kegagalan dalam mempromosikan nilai toleransi

keberagaman. Dengan menganalisis konten Kurikulum 2013, Djalong menunjukkan ketidakjelasan arahan dari dokumen kurikulum berkenaan dengan beberapa isu fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya permasalahan toleransi, kewarganegaraan, dan keragaman budaya-agama di Indonesia. Kurikulum idealnya dapat mencakup permasalahan persatuan dan keberagaman sebagai modal sosial masyarakat Indonesia (Farisi, 2014).

Berdasarkan deskripsi historis dan permasalahan dalam Kurikulum 2013, tersebut penelitian ini berusaha menganalisis konstruksi wacana *Bhinneka Tunggal Ika* dalam Revisi Kurikulum 2013. Kajian mengenai konstruksi wacana *Bhinneka Tunggal Ika* dalam Kurikulum Pendidikan Sejarah diperlukan sebagai bagian dari evaluasi kurikulum berkaitan dengan sejauh mana persatuan dan keberagaman dikukuhkan dalam institusi pendidikan. Terlebih saat ini kurikulum harus menghadapi dinamika permasalahan politik, sosial, dan keagamaan yang menuntut kontekstualisasi konten kurikulum terhadap masalah-masalah keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia.

Metode

Dokumen Revisi Kurikulum 2013, khususnya dokumen Silabus Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas untuk Mata Pelajaran Sejarah Indonesia (2016) menjadi korpus yang diteliti. Analisis Wacana Kritis dengan pendekatan *socio-cognitive* (van Dijk, 2017) digunakan sebagai alat menganalisis yang terdiri dari tiga lapisan yang saling bersinggungan yaitu analisis teks, konteks, dan intertekstualitas dari dokumen kurikulum. Analisis teks berfokus pada tingkatan kajian implisit teks kurikulum dengan mempertimbangkan pilihan kata, personifikasi, perspektifikasi, dan nominalisasi. Analisis konteks fokus pada dialektika antara teks kurikulum dan kondisi sosial, politik, budaya, dan keagamaan di Indonesia untuk melihat bagaimana pemosisian (*positioning*) kurikulum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu kajian, intertekstualitas fokus menelusuri jaringan kewacanaan yang ada dalam kurikulum dan teks-teks yang lain. Ketiga lapisan analisis tersebut saling bersinggungan sehingga hasil temuan dalam tulisan ini tidak terbagi kedalam tiga sub bab analisis tersebut

Secara implisit, dokumen Silabus Sejarah Indonesia untuk SMA menekankan peranan Kurikulum 2013 sebagai bagian dari penyempurnaan 14 pola pikir yang salah satunya berkaitan dengan “*pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik*”. Pola pikir untuk mengakui perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik didesain untuk menghadapi tantangan global dan permasalahan nasional. Kurikulum 2013 menyebutkan bahwa terdapat permasalahan “*konflik horizontal yang bersifat*

Suku, Agama, Ras, dan Antara Golongan” (SARA) yang “*cenderung mengarah kepada disintegrasi bangsa*”.

Dari tiga kutipan di atas, tampak bahwa persatuan menjadi titik perhatian utama Kurikulum 2013. Kerangka yang dibangun adalah sebagai berikut: Indonesia sedang menghadapi masalah disintegrasi bangsa yang salah satunya disebabkan oleh keberadaan isu SARA dan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan jalan membangun pola pikir yang mengakui perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik.

Major goals dalam Kurikulum Pendidikan Sejarah adalah menjaga persatuan. Kurikulum mendesain domain kemampuan berfikir peserta didik untuk mengakui keberadaan keragaman. Berdasarkan posisi ini secara tekstual kedudukan persatuan lebih penting dibandingkan keberagaman yang dikonstruksi dari hierarki kurikulum tersebut. Kedudukan yang tidak sejajar antara persatuan dan kebhinekaan secara historis telah mengakar dalam wacana *Bhinneka Tunggal Ika*. Dari perspektif historis, posisi struktural ini, yang menempatkan persatuan wacana di atas keberagaman dapat dilacak sebagai transformasi serta warisan politisasi awal wacana *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kondisi mental ini dapat mencerminkan struktur sosial masyarakat Indonesia, karena pendidikan menjadi arena produksi dan reproduksi narasi *Bhinneka Tunggal Ika* (Suryadinata, 1988). Bahkan wacana ini juga menjadi bagian tulang punggung narasi sejarah dalam buku teks Sejarah Indonesia untuk SMA (Abidin, 2017). Secara historis, *Bhinneka Tunggal Ika* telah berakar sebagai modus kognitif integrasi bangsa. Soekarno telah menghasilkan istilah *Bhinneka Tunggal Ika* dari naskah kuno Kerajaan Majapahit, *Kakawin Sutasoma* (Aoyama, 1986), dan Soekarno juga menggunakannya tepat sebagai mitos nasional (Fisher, 1967) untuk membangkitkan rasa pluralisme aktif (Vatikiotis, 2013) selama pergolakan politik dalam Demokrasi Konstitusional dan kemudian dalam era Demokrasi Terpimpin (Feith, 2006).

Pada periode berikutnya, istilah ini direproduksi dalam kerangka tafsiran Orde Baru untuk menciptakan stabilisasi politik-ekonomi melalui wacana harmoni dan persatuan (Carnegie, 2010; Prawiradinata, 1988). Istilah *Bhinneka Tunggal Ika* telah dimasukkan sebagai strategi budaya dan dalam derajat tertentu, sebagai ideologi integratif bersama dengan penindasan politik-militer (Weatherbee, 1981). Setelah jatuhnya Orde Baru, istilah ini mengadopsi terus menerus-bahkan beberapa intelektual seperti Suparlan (2014) dan Boellstorff (2000) telah mempertanyakannya.

Gejala-gejala posisi yang tidak setara dari kesatuan di atas keberagaman telah ditunjukkan oleh pengamatan Pauker (1958) maupun Bemmelen dan Raben, Borg, & Johansson (2011) bahwa sejak tahun 1950 pemerintah telah

peduli dengan kesatuan yang menghasilkan kesan kepentingan nasional. Sebagai argumentasi (Heesterman, 1986), posisi yang tidak setara ini membawa makna paradoks bagi Bhinneka Tunggal Ika bahwa di satu sisi orang-orang harus saling berintegrasi di satu negara tetapi di sisi lain, mereka juga memegang identitas lokal mereka dan pada tingkat tertentu, aspirasi lokal. Tidak diragukan, dalam beberapa kasus, makna paradoks ini menghasilkan masalah-masalah penting dalam masyarakat.

Dari sudut pandang ini, penulis menyatakan bahwa ada masalah antara nasionalisme dan keragaman, khususnya terhadap kehadiran orang lain di masyarakat Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh Sariyatun & Sumardjoko (2018), kondisi ini dapat diperburuk karena masalah intoleransi minoritas dalam pendidikan Indonesia. Masalahnya adalah posisi yang tidak seimbang antara kesatuan dan keragaman.

Penelitian ini menunjukkan pengaruh utamaan persatuan dan dalam tingkatan tertentu, peminggiran keberagaman. Akibatnya, tentang masalah minoritas dalam pendidikan di Indonesia, narasi keragaman kurang disajikan dalam narasi buku teks atau dalam wacana kelas. Artinya, dengan menggunakan kerangka (Salmi, 1993), narasi diskursus dan pengetahuan tentang etnisitas dimusnahkan. Dalam kondisi ini, masalah persatuan dan keragaman menjadi lebih rumit karena keragaman kerangka kerja pembangunan bangsa antara kesatuan dan keragaman serta antar etnis dan religiusitas (Meuleman, 2006). Analisis di atas menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia adalah untuk membangkitkan budaya persatuan dalam keberagaman, dengan mempertimbangkan penelitian ini, belum mencapai harapan. Narasi dan wacana kesatuan telah mengemukakan di atas keberagaman. Hak istimewa telah diberikan kepada narasi persatuan.

Sebagai upaya untuk mengkonstruksi kurikulum *kebhinekaan* kami menyodorkan konstruksi *socio-ecological centered* (SEC). SEC dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan pendidikan yang mencoba untuk meniadakan pemusatan yang melahirkan logika subyek dan obyek antara manusia, masyarakat, dan lingkungan. Artinya, SEC mengandaikan ketiadaan pusat. Manusia, masyarakat dan lingkungan adalah satu kesatuan holistik yang saling memengaruhi satu sama lain. Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai jalan tengah dari kontestasi manusia, masyarakat dan alam sekaligus pada tingkatan tertentu dapat menjadi jalan tengah bagi perdebatan antara perbedaan dan persatuan. Dalam pendekatan SEC, titik capaian dari pendidikan tidak hanya terhenti dalam diri seorang individu. Terdapat elemen capaian lain yang harus diwujudkan oleh individu pasca dirinya memiliki kemampuan dan pengetahuan tertentu. Dua elemen capaian tersebut adalah capaian sosiologis dan ekologis.

Capaian sosiologis adalah dampak instruksional dari proses pembelajaran yang tertuju pada bagaimana efek pembelajaran individu terhadap masyarakat sekitarnya dimulai dari tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik yang lain. Dalam kalimat lain, peserta didik wajib menyebarkan temuan atau kemampuan yang dimilikinya kepada peserta didik yang lain. Sedangkan capaian ekologis adalah dampak instruksional yang mengarah pada kesadaran ekologi yang berhubungan dengan lingkungan tempat siswa hidup. Dua capaian ini mendorong tanggungjawab sosial dan ekologis peserta didik. Tanggungjawab sosial dan ekologis ini adalah representasi dari SEC. Diperlukan suatu dorongan untuk mencapai tingkat dimana peserta didik menyadari adanya tanggungjawab sosial dan ekologis. Maka, konstruksi kurikulum Indonesia idealnya mempertimbangkan dimensi personal, sosial dan ekologi untuk menjembatani perdebatan antara perbedaan dan persatuan.

Pengembangan kurikulum juga tentunya tidak melupakan dimensi perkembangan peserta didik yang berawal dari kemampuan aktual yang dimilikinya. Kemampuan aktual peserta didik dapat ditingkatkan melalui *scaffolding* yang membawa peserta didik mengembangkan *zone of proximal development* dan mencapai kemampuan maksimal peserta didik. Namun titik capaian pembelajaran tidak hanya terhenti sampai dengan penguasaan keterampilan personal. Peserta didik didorong untuk melakukan diseminasi dan refleksi. Diseminasi adalah aktivitas berbagi pengetahuan di tingkat sosial paling rendah yaitu kelas. Proses diseminasi mendorong pertumbuhan pengetahuan baru yang dihasilkan dari proses berbagai temuan ilmiah. Persinggungan ini bukan lagi untuk mencapai capaian personal sebagaimana tujuan *scaffolding*, tetapi cenderung bertujuan untuk memberdayakan dimensi sosial peserta didik. Sementara itu proses refleksi adalah bagian dari imajinasi peserta didik untuk turut serta memberikan sumbangan bagi masyarakat dan ekologi mereka. Berbeda dengan kontekstualisasi, refleksi cenderung menempatkan proses berpikir peserta didik dalam permasalahan sosial dan ekologi yang ada disekitar mereka. Ancangan refleksi dan diseminasi ini menyokong peserta didik untuk mencapai tanggungjawab sosial dan ekologi. Artinya, tujuan pendidikan tidak terhenti pada dimensi personal (manusia) tetapi melalui SEC peserta didik didorong untuk berbagi pusat dengan dimensi sosial dan ekologi mereka (kelas, masyarakat dan lingkungan).

Berdasarkan kajian diatas, tampak bahwa konstruksi kurikulum 2013 tidak menempatkan wacana keberagaman dan persatuan dalam kedudukan yang sama. Kecenderungan yang tampak adalah pengarusutamaan wacana persatuan. Hal ini pada tingkatan tertentu tentunya dapat menimbulkan berbagai permasalahan karena secara tekstual meminggirkan wacana

keberagaman. Penulis menyodorkan pendekatan SEC sebagai alternatif untuk menyelaraskan konstruksi *kebhinnekaan* dalam kurikulum pembelajaran sejarah. SEC menyediakan ruang wacana pada tingkatan personal, sosial, hingga ekologis. Pada tingkatan sosial hingga ekologis, kurikulum secara tekstual dapat menyediakan ruang bagi wacana perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia.

Simpulan

Konstruksi wacana *Bhinneka Tunggal Ika* dalam Revisi Kurikulum 2013 menunjukkan pengarusutamaan persatuan sebagai *major goal* dibandingkan dengan keberagaman. Pengarusutamaan ini disusun dengan logika hierarkis bahwa persatuan dapat dicapai melalui pengakuan atas keberagaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara diskursif Revisi Kurikulum 2013 mengkonstruksi wacana *Bhinneka Tunggal Ika* dalam ruang negosiasi antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional dan penguatan keberagaman dalam persatuan. Dua dimensi ini menjadi basis empiris dari landasan pengembangan kurikulum. Teks *Bhinneka Tunggal Ika* secara kontekstual merefleksikan pengharapan terciptanya kesetaraan antara keberagaman dan persatuan. Berdasarkan simpulan ini, peneliti merekomendasikan kesetaraan antara persatuan dan keberagaman. Permasalahan keberagaman tidak harus ditempatkan sebagai bagian dari persatuan. Dengan demikian, tujuan pengakuan keberagaman adalah menciptakan kesadaran *kebhinnekaan*.

Daftar Rujukan

- Abidin, N. F. (2017). Narasi Nasionalisme dan Logika Oposisi Biner dalam Buku Teks Sejarah dari Orde Baru hingga Post-reformasi. In S. Margana, R. Sekarningrum, & A. Faisol (Eds.), *Menemukan Historiografi Indonesiasentris* (pp. 436–460). Yogyakarta: penerbit Ombak.
- Ali. (1995). *Laporan Seminar Sedjarah, 1958*.
- Aoyama, T. (1986). The Adoption and Structural Transformation in Old Javanese Literature of Sutasoma, an Indian Buddhist Story. *Tonan Ajia Kenkyu (Southeast Asian Studies)[Kyoto]*, 24(1), 3–17.
- Boellstorff, T. D. (2000). *A New Archipelago Concept for the Era of Reform?*
- Carnegie, M. (2010). Living with difference in rural Indonesia: What can be learned for national and regional political agendas? *Journal of Southeast Asian Studies*, 41(3), 449–481.
- Djalong, F. (2017). Investing Intolerance: “Pendidikan Karakter” and Curriculum 2013.
- Farisi, M. I. (2014). *Bhinneka Tunggal Ika [Unity in Diversity]: From Dynastic Policy to Classroom Practice*. *J SSE-Journal of Social Science Education*, 13(1).
- Feith, H. (2006). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. New

- York: Equinox Publishing.
- Fisher, C. A. (1967). Economic myth and geographical reality in Indonesia. *Modern Asian Studies*, 1(2), 155–189.
- Heesterman, J. C. (1986). IV. Unity and Diversity in India and Indonesia. *Itinerario*, 10(1), 83–96.
- Meuleman, J. (2006). Between unity and diversity: The construction of the Indonesian nation. *European Journal of East Asian Studies*, 5(1), 45–69.
- Pauker, G. J. (1958). Indonesian images of their National Self. *Public Opinion Quarterly*, 305–324.
- Prawiradinata, M. S. (1988). *Stability, elites and development policy in the new order Indonesia 1966-1983*.
- Raben, H., Borg, J., & Johansson, J. (2011). Improved efficiency in the CMOS cross-connected bridge rectifier for RFID applications. *Proceedings of the 18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems-MIXDES 2011*, 334–339. IEEE.
- Salmi, J. (1993). *Violence and democratic society: new approaches to human rights*. Zed Books.
- Sariyatun, H. J., & Sumardjoko, B. (2018). Proliferation of Democratic Education in Indonesia: The Influence Measurement of Tolerance, Multiculturalism, and Historical Awareness on the Democratic Attitude. *Stanisław Juszczak*, 112.
- Suparlan, P. (2014). Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan? *Antropologi Indonesia*.
- Suryadinata, L. (1988). Government Policy and National Integration in Indonesia. *Southeast Asian Journal of Social Science*, 111–131.
- van Dijk, T. A. (2017). Socio-cognitive discourse studies. In *The Routledge handbook of critical discourse studies* (pp. 26–43). Routledge.
- Vatikiotis, M. R. J. (2013). *Indonesian politics under Suharto: The rise and fall of the New Order*. Routledge.
- Weatherbee, D. E. (1981). The Indonesianization of East Timor. *Contemporary Southeast Asia*, 3(1), 1–23.